



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA EVALUASI DIKDASMEN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Persatuan Guru Republik Indonesia 2. Federasi Serikat Guru Indonesia 3. Ikatan Guru Indonesia 4. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia
Hari/Tanggal	: Senin, 4 September 2017.
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Tuti Retnowati, B.Sc /Kasubag Rapat Set. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Dikdasmen dalam Renstra pendidikan 2015 – 2019; 2. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait Dikdasmen di setiap satuan Pendidikan sesuai dengan standar yang disyaratkan Standar Nasional Pendidikan; 3. Fungsi dan peran yang perlu dilakukan Negara terkait Dikdasmen sesuai dengan standar Nasional Pendidikan; 4. Kondisi Dikdasmen saat ini; 5. Lain-lain.
Hadir	: 18 orang dari 29 Anggota Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR-RI.
Hadir dari Organisasi Profesi Guru	: 1. DR. Unifah Rosyidi, M.Pd (Ketua PGRI) 2. MM. Isti Handayani (FSGI) 3. Anshar Syukur (IGI) 4. Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, MA (Ketua ISPI)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI dengan Dewan Pendidikan Provinsi dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas paparan dan penjelasan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) mengenai kondisi dan permasalahan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia.
2. **Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)** menyampaikan pandangan antara lain sebagai berikut:
 - a. Diantara 8 Standar Nasional Pendidikan, standar yang paling utama adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - b. Mengapresiasi kebijakan dan program pemerintah antara lain terkait akses, kualitas, penguatan pendidikan karakter, PPDB, Ujian Nasional, *Vocational Education* dan *SDG's*.
 - c. Pengalihan kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten/kota ke Provinsi masih banyak menyisakan masalah di daerah.
 - d. Rasio guru dan siswa saat ini secara ideal belum memadai.
 - e. Guru produktif di SMK saat ini hanya 22 % dari jumlah guru yang dibutuhkan.
 - f. Kondisi pendidikan di Indonesia perlu ketahanan tersendiri dalam bentuk penguatan karakter yang berbasis nilai-nilai kultural lokal dalam merespon kondisi saat ini. Oleh karena itu diperlukan tripusat pendidikan (masyarakat, sekolah keluarga, maya dan sebaya)

Selanjutnya PGRI menyampaikan usulan sebagai berikut:

- a. Pendidikan di Indonesia perlu mempersiapkan menghadapi generasi Z dan generasi alpha.
- b. Pendidikan di Indonesia perlu mempersiapkan secara benar memasuki era digital, khususnya fenomena media sosial.
- c. Perlunya pendekatan etnopedagogi dalam pembelajaran sebagai pendekatan budaya.
- d. Terkait BOS, regulasi sertifikasi dan status kepegawaian, alih kewenangan SMA/SMK, Dapodik, Kurikulum, infrastruktur, sekolah swasta, program pendidikan vokasi, sistem penilaian pendidikan, rasio guru dan siswa, penguatan pendidikan nonformal, penguatan peran serta orangtua, kekurangan guru dan honorer, dan pembagian tugas dan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah (*terlampir hal 6-9.*)
- e. LPTK harus diberikan keleluasaan dalam mengembangkan pendidik dan tenaga pendidikan.

- f. Terkait permasalahan guru honorer, PGRI mengusulkan:
- ✓ Tersedia data yang akurat jumlah guru honorer katagori dan non katagori.
 - ✓ Melarang kepala sekolah mengangkat secara terus menerus tenaga honorer tanpa disertai analisis kebutuhan dan persetujuan dari Disdik setempat.
 - ✓ Membuat prioritas penyelesaian jangka panjang dan jangka pendek. Secara jangka panjang mendukung revisi ASN
 - ✓ Membuat prioritas penyelesaian secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah
 - ✓ Memprioritas pengangkatan CPNS 3 T untuk guru honorer yang berasal dari daerah setempat , telah lama mengabdikan dan mengerti kultur
 - ✓ Honorer yang telah berusia diatas 35 tahun dapat menjadi pegawai P3K secara bertahap sesuai kemampuan, penanda tangan kontrak sekali,
 - ✓ Melakukan revisi PP. 48 tahun 2005 secara ketat dan sesuai kebutuhan. Pemda diberi kewenangan untuk mengangkat honorer Pemda dengan dana APBD sehingga ada jaminan kesejahteraan minimum sesuai dengan UMP.
 - ✓ Mengisi kekurangan guru dilakukan dengan pengangkatan CPNS honorer sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
 - ✓ Turut dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi honorer yang bekerja penuh.

3. **Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)** menyampaikan permasalahan mengenai pendidikan dasar dan menengah saat ini, antara lain sebagai berikut:
- a. Kesenjangan sarana prasarana pendidikan, belum terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan di berbagai daerah, Guru berkualitas yang belum merata, Pelatihan Guru yang tidak terencana, tersistematis, berkelanjutan dan bersifat teoritis, serta semakin masifnya kekerasan di dunia pendidikan.
 - b. Hasil survey yang dilakukan FSGI pada tahun 2012 menunjukkan data bahwa pelatihan guru sangat minim terutama untuk guru SD, dimana 62% guru SD belum pernah mengikuti pelatihan sampai menjelang pensiun.
 - c. Terkait kekerasan di dunia pendidikan di Indonesia, berdasarkan penelitian Plan International Indonesia dan ICRW (*International Center for Research on Women*) pada 2014, menunjukkan bahwa 84% siswa atau 7 dari 10 siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah.

Selanjutnya FSGI menyampaikan usulan/rekomendasi sebagai berikut:

- a. Agar Pemerintah berkonsentrasi memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), daripada membuat kebijakan FDS tanpa mempertimbangkan kesiapan di lapangan
- b. Penyelenggaraan pelatihan guru harus didasarkan pada pemetaan dan analisis kebutuhan, terkonsep dengan jelas, sistematis dan berkesinambungan.

- c. Membangun guru berkualitas harus dimulai dari hulunya, yaitu dari pendidikan sekolah gurunya yang saat ini berada dibawah kewenangan Kemenristekdikti RI
 - d. Agar Komisi X DPR RI dapat mempertimbangkan kembali kebijakan FDS Kemendikbud RI yang tidak didasarkan pada kesiapan lapangan. Namun demikian, FSGI sangat mendukung penguatan pendidikan karakter akan tetapi tidak dengan konsep yang disampaikan pemerintah saat ini.
4. **Ikatan Guru Indonesia (IGI)** menyampaikan pandangan masih ada masalah terkait pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan fakta dilapangan, antara lain sebagai berikut:
- a. **Standar Isi**, khususnya terkait pembuatan kurikulum, implementasi nilai-nilai pendidikan karakter, muatan lokal, belum optimalnya lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran, TIK yang tidak terimplementasi dalam setiap mata pelajaran.
 - b. **Standar Kelulusan**, khususnya terkait akhlak dan nilai sportifitas yang rendah, ekstrakurikuler yang berkurang, serta penulisan karya ilmiah yang rendah.
 - c. **Standar Proses**, khususnya terkait pengembangan RPP, penggunaan TIK, jumlah siswa yang melebihi rombel, dan rasio buku teks yang belum memenuhi.
 - d. **Standar Penilaian**, khususnya terkait guru yang belum menguasai penilaian sesuai standar, guru belum menguasai instrumen penilaian yang baik, dan banyak guru yang belum mengembalikan pekerjaan siswa.
 - e. **Standar Sarana Prasarana**, khususnya terkait media pembelajaran, perlengkapan laboratorium, TIK, kekurangan RKB, tempat ibadah, buku teks pelajaran untuk siswa yang kurang, serta akses ke sekolah yang belum merata.
 - f. **Standar Pembiayaan**, khususnya terkait program pembiayaan yang dikoordinir pihak lain, sumber dana yang terlambat, belum melibatkan stakeholders, dana BOS, dan dampak sekolah gratis gaji guru honorer dan GTT, partisipasi dari dunia usaha dan dunia industri.
 - g. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, khususnya terkait jumlah guru, kualitas guru, pelatihan guru, status kepegawaian guru, dan terkait jumlah dan kualitas tenaga administrasi.
 - h. **Standar Pengelolaan Pendidikan**, khususnya terkait media penghubung dan informasi sekolah, penguatan strategi vokasional, komitmen pemerintah untuk merevitalisasi SMK, dan dampak pengalihan kewenangan SMA/SMK, serta permasalahan PPDB *online*.

Selanjutnya IGI menyampaikan usulan sebagai berikut:

- a. Terkait organisasi profesi, Pemerintah dan DPR RI agar memberikan kebebasan kepada guru untuk memiliki organisasi profesi
- b. Pembayaran tunjangan sertifikasi dilakukan langsung melekat pada gaji guru tiap bulan.

- c. Pemberkasan kelengkapan pembayaran tunjangan sertifikasi dilakukan satu kali dalam satu tahun ajaran atau minimal dalam satu semester.
 - d. Peninjauan kembali syarat kelulusan UKG.
 - e. Adanya aturan kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) untuk para guru honorer
 - f. Percepatan peningkatan pendidikan berbasis instrumen pembelajaran daring
 - g. Segera memberlakukan kenaikan pangkat otomatis dan penetapan pensiun otomatis bagi guru.
5. **Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)** menyampaikan pandangan antara lain sebagai berikut:
- a. Mengapresiasi kebijakan penguatan pendidikan karakter (PPK). Oleh karena itu, dalam membangun pendidikan bangsa yang berkarakter, Pemerintah perlu menjadikan sekolah sebagai pusat kebudayaan, serta mengembangkan sekolah yang aman dan damai.
 - b. Penyelenggaraan Dikdas yang menyangkut wajar 9 tahun, sebagai satu keutuhan SD dan SMP harus diupayakan agar sepenuhnya dibiayai Pemerintah, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, dirancang secara sistematis, dan mengakses seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak tak beruntung dan populasi khusus.
 - c. Penyelenggaraan Dikmen yang menyangkut SMA/SMK perlu diupayakan agar:
 - ✓ SMA harus benar-benar menjadi lembaga yang fungsi utamanya menyiapkan peserta didik yang paling berbakat.
 - ✓ SMK dikembangkan sesuai dengan prinsip *link and match* dan disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja.
 - ✓ Siswa SMA dan SMK hendaknya dilakukan asesmen keberbakatan akademik dan vokasional untuk mengarahkan pilihan program dan pengembangan karir dengan mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling secara profesional.
 - d. Implementasi kurikulum dan sistem asesmen di sekolah harus mendorong dan menumbuhkan kreatifitas guru, dan restrukturisasi kurikulum serta penselarasan kompetensi SMK dapat disinergikan dengan uji kompetensi profesi yang mengacu SKKNI.
 - e. Pengembangan dan pembinaan guru sebagai pemeran utama implementasi kurikulum harus dilaksanakan secara utuh, dan pendidikan sebagai tanggung jawaban antara keluarga, pemerintah dan masyarakat perlu memperoleh penguatan dan penegasan peran dan fungsi sebagai satu keutuhan sistem.
 - f. Otonomi pendidikan sejatinya hanya sampai pada tingkat provinsi.
 - g. Anggaran pendidikan harus secara sungguh-sungguh diimplementasikan berdasarkan amanat konstitusi dan menganut negara kesejahteraan serta diprioritaskan untuk pelaksanaan wajar 9 Tahun, beasiswa, mahasiswa berbakat, beasiswa pelajar berprestasi dan kurang mampu, ikatan dinas dan insentif.

- h. Pengelolaan pendidikan harus dilaksanakan dengan memegang prinsip profesionalisme dengan komitmen, konsisten, dan segala konsekuensinya.

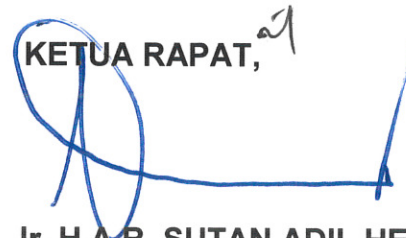
Selanjutnya ISPI menyampaikan usulan/rekomendasi sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional serta akreditasi tingkat kelayakan sekolah di seluruh Indonesia.
 - b. Menyusun program dan melaksanakan secara konsisten program-program tersebut untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan dalam PP No.19/2005.
 - c. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan tenaga kependidikan, maka perlu koordinasi yang baik antara Kemendikbud RI dan Kemenristekdikti RI.
 - d. Perlu segera membentuk Dewan Pendidikan Nasional.
 - e. Segala bentuk regulasi, kebijakan, dan kegiatan yang diluncurkan untuk perbaikan mutu pendidikan perlu divalidasi konsistensinya secara filosofis dan konstitusional, disertai dengan penyiapan sistem yang mendukung implementasinya yang jelas dari pusat sampai satuan pendidikan.
6. Paparan dari PGRI, FSGI, IGI dan ISPI sebagaimana terlampir, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini.
7. Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI memberikan catatan dan pandangan sbb:
- a. Permasalahan guru saat ini merupakan permasalahan krusial pendidikan diantaranya tentang pembinaan karir guru yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat.
 - b. Mendesak PGRI, FSGI, IGI dan ISPI secara bersama-sama untuk terus berperanserta membangun dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, khususnya terkait pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Mengharapkan PGRI, FSGI, IGI dan ISPI untuk memberikan data dan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan permasalahan pendidikan dasar dan menengah yang terbaru dengan memberikan salah satu contohnya.
 - d. Segala masukan, usulan dan kritik dari PGRI, FSGI, IGI dan ISPI melalui forum RDPU hari ini akan menjadi bahan kajian Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah.
 - e. Perlu membuat *grand design* tentang pendidikan dasar dan menengah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
8. Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI mengharapkan Jawaban dan tanggapan dari PGRI, FSGI, IGI dan ISPI diberikan secara tertulis sesuai ruang lingkup dan tujuan Panja Evaluasi Dikdasmen dan diterima Sekretariat Komisi X DPR RI paling lambat pada tanggal 15 September 2017.

9. Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI akan mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memasukan mata pelajaran TIK dan bahasa asing dalam kurikulum.
 - b. Melakukan akselerasi pendidikan *home schooling*.
 - c. Kebijakan perlindungan hukum kepada guru.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.37 WIB

KETUA RAPAT,^{al}


Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M